

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai kekayaan alam dan sumber daya yang beraneka ragam. Selain mempunyai daya tarik pariwisata alam juga sebagai sumber pangan dan menambah devisa negara. Potensi alam yang sedemikian rupa akan menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan akan memberikan keuntungan sendiri bagi negara. Upaya pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif maupun negatif. Beberapa sektor yang mempengaruhi kegiatan pariwisata diantaranya sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Peranan pariwisata dalam sektor ekonomi dapat dikategorikan sebagai sebuah sektor yang memberikan dampak ekonomi yang besar bagi sebuah daerah. Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat di dorong melalui pembangunan pariwisatanya. Sumber daya ialah modal paling besar dalam pembangunan pariwisata dengan memperhatikan berbagai fasilitas dan potensi yang dimiliki daerah seperti kekayaan alam, peninggalan prasejarah, seni dan budaya serta kebiasaan masyarakat juga berbagai fasilitas yang dimiliki berbagai daerah kemudian peningkatan pembangunan yang berkesinambungan, sistematis dan tanggung jawab yang dilandasi dengan berbagai norma seperti agama, nilai budaya berwawasan lingkungan yang ada ditengah masyarakat.

Setiap daerah tentunya memiliki potensi wisata yang berbeda-beda tergantung pada pemerintah dan masyarakat membangun potensi wisata tersebut hingga menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan untuk berkunjung ke daerah. Secara khusus yakni Provinsi Jawa Barat memiliki daya tarik wisata yang sangat beraneka ragam jenis wisata alam, budaya, maupun buatan yang tersebar di wilayah Jawa Barat, dengan keunikan lokal yang khas yang memperkuat daya saing produk wisata Jawa Barat. Keragaman daya tarik Jawa Barat dinyatakan dengan GURILAPS (Gunung, Rimba, Air laut, Pantai dan Seni Budaya). Berbeda dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan wisata budayanya, Provinsi Jawa Barat mengedepankan keragaman daya tarik untuk memperkuat daya saing produk wisata.

Terkait kebijakan dalam kepariwisataan, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, maka kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata sudah mempunyai payung hukum, dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah selanjutnya sehingga dikeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata sebagai upaya peningkatan kualitas pariwisata di Kota Bandung. Melalui kebijakan berupa Peraturan pemerintah tersebut, untuk daerah Provinsi Jawa Barat yang didalamnya termasuk wilayah Kota Bandung maka ketentuan dari pemerintah ini dilaksanakan dengan membuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025.

Kota Bandung memiliki kawasan wisata yang dapat dijadikan sebagai potensi dan peluang tersendiri, selain adanya potensi budaya pun bisa dijadikan nilai jual wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Daya tarik wisata di Kota Bandung terdiri dari 91 kawasan wisata primer dan 53 kawasan wisata sekunder sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025, terdapat 6 Kawasan Strategis Pariwisata dan 15 Kawasan pengempangan. Adapun masih terdapat 2 destinasi pariwisata yang masih kurang dalam pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dengan begitu Kota Bandung harus mulai dan terus membenahi berbagai infrastruktur, keamanan dan kenyamanan berbagai tempat tujuan wisata, termasuk dalam hal pengembangan.

Setiap Kawasan mempunyai tujuan pembangunan destinasi pariwisata masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 7B ayat (2) yang berbunyi: Bahwa pembangunan destinasi wisata daerah kota meliputi: a. Pemberdayaan Masyarakat; b. Pembangunan daya tarik wisata; c. Pembangunan Prasarana; d. Penyediaan Fasilitas Umum; e. Pembangunan Fasilitas Pariwisata Terpadu dan Berkesinambungan; dan f. Peluang Investasi.

Adanya sasaran pembangunan destinasi pariwisata yang ingin dicapai oleh Kota Bandung menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan karakteristik nilai daya saing masing-masing kawasan juga akan terciptanya identitas destinasi pariwisata yang ada di Kota Bandung dan

memudahkan masyarakat untuk menentukan tempat tujuan wisata yang akan dituju.

Pemerintah memiliki tujuan dalam pengembangan pariwisata agar berbagai potensi wisata yang ada dapat berhasil dikembangkan, dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah tentu harus membuat suatu kebijakan pengembangan pariwisata. Dalam mencapai suatu tujuan kebijakan yang terkait dengan pengembangan pariwisata tentunya tidak akan berhasil dan tercapai dengan sendirinya tanpa di implementasikannya kebijakan tersebut. Untuk mengembangkan kepariwisataan, perlu pengembangan dan kegiatan kepariwisataan yang diperkuat dengan peraturan dan prioritas pemerintah serta perlunya pengadaan fasilitas pelayanan pendukung wisatawan diantaranya sarana transportasi, akomodasi, keamanan dan hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang program pengembangan pariwisata.

Pemerintah Kota Bandung memiliki strategi yang baik dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kota Bandung yang ada di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2018-2023, tetapi dalam implementasi pengembangan destinasi wisata ditemukan beberapa permasalahan yaitu banyaknya destinasi wisata di Kota Bandung yang tidak memenuhi aspek:

1. Atraksi (*what to see, what to do, dan what to buy*)
 - a. Kota Bandung yang tidak memiliki tema wisata;
 - b. Kurangnya daya tarik wisatawan yaitu seperti museum-museum di Kota Bandung;

2. Aksesibilitas (sarana dan infrastruktur)

- a. Destinasi wisata kurang mudah dijangkau oleh wisatawan seperti, jalan yang sempit sehingga bus pariwisata besar sulit untuk masuk (saung udjo, tahura) dan jalan jarak antar tempat wisata di Bandung Raya ditempuh dalam waktu lebih dari 4 jam:
- b. Mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk mengunjungi destinasi wisata di Kota Bandung;

3. Amenitas (fasilitas pendukung wisatawan);

- a. Akomodasi yang mendukung destinasi wisata Kota Bandung sulit (yaitu hotel-hotel di Kota Bandung yang mahal dan penuh saat *weekend*);
- b. Lahan parkir yang tidak mumpuni di beberapa tujuan wisata seperti Pasar Baru (sekitar alun-alun Kota Bandung) dimana tarif parkir hingga Rp. 300.000,-/ parkir (untuk bus pariwisata);
- c. Faktor kenyamanan dimana PMKS masuk di perempatan jalan saat *traffic light* dengan mudah.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas objek pariwisata di Kota Bandung. Sasaran pokoknya yaitu meningkatnya kualitas destinasi pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Dengan strategi meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung. Dengan arah kebijakan mengembangkan kualitas destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi meliputi atraksi, amnenitas dan akseibilitas yang ditunjang peningkatan daya saing

industri, kelembangaan dan sumber daya manusia pariwisata serta pemasaran wisata.

Upaya pengembangan pariwisata Kota Bandung perlu diukur untuk menggambarkan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Indikator jumlah kunjungan wisatawan dipakai untuk menggambarkan bahwa Kota Bandung digemari masyarakat untuk berwisata sebagai hilir dari pembangunan 6 lingkup pembangunan pariwisata sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Indikator jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Kota Bandung. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2025. Adapun angka pengunjung ke Kota Bandung pada tahun 2015-2019 tercatat sebagai berikut

Tabel 1.2

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Ke Kota
Bandung Tahun 2015-2020**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	
2015	183,932	5,877,162	6,061,094
2016	173,036	4,827,589	5,000,625

2017	176,855	5,080,584	5,257,439
2018	278,420	6,682,092	6,960,512
2019	252,842	8,175,221	8,428,06

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2015-2020 pertumbuhan kunjungan wisatawan baik Wisatawan Mancanegara maupun Wisatawan Nusantara selalu meningkat walaupun peningkatan dan penurunan tidak seimbang setiap tahunnya, namun pada tahun 2016 sempat terjadi penurunan yaitu dari jumlah 6,061,094 menjadi 5,000,625 pengunjung. Kemudian pada tahun 2019 jumlah wisatawan mengalami peningkatan kembali yang berada pada jumlah 8,428,06 pengunjung. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diharapkan bisa mengoptimalkan dan meningkatkan objek wisata melalui program pengembangan destinasi pariwisata.

Implementasi kebijakan program pengembangan destinasi pariwisata di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum optimal. Karena masih terdapat destinasi wisata dibawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang masih kurang dalam pengembangan yaitu Kampung Wisata Pasir Kunci dan Museum Kota Bandung. Kedua objek wisata tersebut belum dikelola secara optimal, ditandai dengan sarana dan prasarana masih perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah karena secara umum sarana dan prasarana yang ada masih dianggap kurang menunjang wisatawan. Kegiatan selanjutnya yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata ditandai dengan terdapat bangunan yang tidak terpakai dan beberapa

fasilitas yang sudah rusak. Pemeliharaan menjadi hal penting karena ini menyangkut kondisi fasilitas penunjang yang didapatkan oleh para pengunjung sebuah objek wisata. Masalah yang terjadi di dalam kebijakan program pengembangan destinasi pariwisata penting untuk diteliti karena menyangkut adanya suatu hal terjadi di dalam pelaksanaan program yang belum sesuai dengan isi program dan dapat menjadikan penurunan minat wisatawan yang akan datang ke sebuah obyek wisata.

Sesuai arah kebijakan melaksanakan program pengembangan destinasi pariwisata yang tertuang dalam Renstra. Berkaitan dengan hal itu, kualitas sumber daya manusia kepariwisataan masih berkuat dengan masalah rendahnya kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia bidang kepariwisataan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dibuktikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pariwisata	1
2.	Seksi Destinasi	2
3.	Seksi Usaha Jasa Pariwisata	4
4.	Seksi Sumber Daya Manusia	2
5.	Non PNS	3
Jumlah Keseluruhan		12

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2020

Berdasarkan tabel diatas bidang kepariwisataan berjumlah 12 orang namun belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata. Seharusnya sumber daya manusia tersebut menjadi instrumen yang menentukan keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan. Sesuai dengan arah kebijakan mengembangkan kualitas destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi meliputi atraksi, amnenitas dan aksebilitas yang ditunjang peningkatan daya saing industri, kelembangaan dan SDM pariwisata serta pemasaran wisata.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Alasan dari pemilihan lokasi iini adanya kertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini dikarenakan Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat seharusnya destinasi pariwisatanya sudah maksimal, namun masih terdapat destinasi di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam salah satu programnya masih terdapat beberapa destinasi yang kurang dalam pengembangannya yaitu Kampung Wisata Pasir Kunci dan Museum Kota Bandung. Berbeda dengan Kabupaten Karawang yang memiliki kedudukan jauh dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat akan tetapi membuatnya strategis dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Kabupaten Karawang tercatat dalam BPS Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017-2019 menduduki peringkat pertama dalam sektor pariwisata terutama jumlah kunjungan wisawatan ke objek wisata baik Wisatawan Mancanegara maupun Wisatawan Nusantara.

Penelitian yang biasanya dilakukan dalam sektor pariwisata lebih mengenai strategi pengembangan objek wisata tersebut. Maka dari itu keunggulan dari penelitian ini lebih mendalami sejauh mana kebijakan program pengembangan destinasi pariwisata di Kota Bandung yang dilakukan oleh aktor pemerintah atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan yang dihadapinya, sehingga mampu untuk mengevaluasi kinerja dan penentuan langkah yang tepat kedepannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan kebijakan program pengembangan destinasi pariwisata di Kota Bandung khususnya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dalam menetapkan hal diatas dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Bandung (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan program pengembangan destinasi pariwisata di Kota Bandung, masih terdapat destinasi pariwisata dibawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang masih kurang

dalam pengembangan yaitu Kampung Wisata Pasir Kunci dan Museum Kota Bandung dengan permasalahan peningkatan sarana dan prasarana masih perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah karena secara umum sarana dan prasarana yang ada masih dianggap kurang menunjang wisatawan.

2. Rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang kepariwisataan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
2. Bagaimana sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
3. Bagaimana karakteristik agen pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
4. Bagaimana sikap atau kecenderungan para pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
5. Bagaimana komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
6. Bagaimana lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
2. Untuk mengetahui sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
3. Untuk mengetahui karakteristik agen pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
4. Untuk mengetahui sikap atau kecenderungan para pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
5. Untuk mengetahui komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
6. Untuk mengathui lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

E. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Kegunaan bagi peneliti adalah untuk menerapkan ilmu atau teori yang sudah didapatkan selama kuliah serta memberikan sumbangan berupa

pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan publik.

- b) Memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

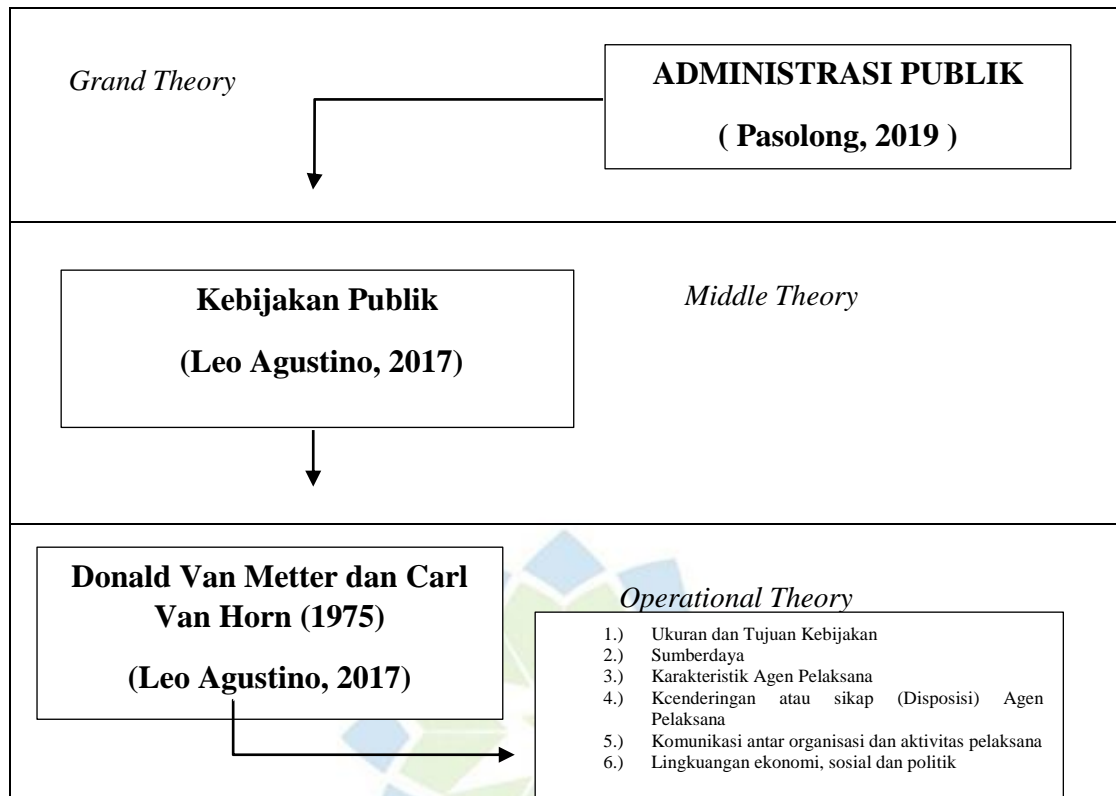
- a) Bagi Instansi, Sebagai bahan saran dan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan program yang dilakukan setiap unit pelayanan yang diberikan kepada *stakeholders* yang nantinya sedikit demi sedikit akan diperbaiki sehingga pelayanan yang diberikan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan maksimal di setiap programnya.
- b) Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.



F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep yang dimana terdiri dari *Grand Theory* , *Middle Theory* , dan *Operational Theory* . Dimulai dari *Grand Theory* atau Teori Umum yang digunakan adalah Administrasi Publik , *Middle Theory* atau Teori Antara yang digunakan adalah Kebijakan Publik dan *Operational Theory* atau Teori Operasional yang digunakan yaitu Implementasi Kebijakan. Dari penjelasan tersebut maka konsep tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2
Kerangka Konseptual



Grand Theory atau Teori Umum yang digunakan yaitu Administrasi Publik ,yang mana penulis mengambil teori dari Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2019) dibuku yang berjudul Teori Administrasi Publik “Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi personel dan perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintah”. Secara luas Administrasi publik ini mencakup organisasi dan manajemen yang mana pada manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang milik daerah.

Middle Theory atau Teori Antara yang digunakan yaitu kebijakan publik yang mana penulis mengambil teori Thomas R Dye dalam buku (Agustino, 2017) yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Kebijakan publik ialah apapun yang dimana harus pemerintah kerjakan dan yang tidak dikerjakan.

Operational Theory atau Teori operasional yang digunakan yaitu Implementasi Kebijakan, yang mana penatausahaan ini merupakan bagian dari kebijakan publik. Dalam teori operasional ini, penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Agustino, 2017:133). Ada enam variabel yang telah dikemukakan oleh Donald van Metter dan Carl Van Horn, dengan variabel tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan, yaitu: ukuran dan tujuan; sumber daya; komunikasi antar organisasi; kecenderungan pelaksana; karakteristik agen pelaksana; dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975) karena teori tersebut relevan dengan apa yang akan diteliti dan sesuai dengan permasalahan yang ada, serta dikarenakan teori tersebut merupakan salah satu teori yang menggunakan model pendekatan *top down* yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Sebagaimana pemilihan subjek pada penelitian ini yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, maka teori tersebut menjadi acuan pelaksanaan sebuah kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Agustino, 2017:133-136) mengajukan enam variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultural yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat peng implementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Pihak pelaksana memiliki kecenderungan terhadap dampak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, apabila pelaksana memiliki sikap yang negative terhadap kebijakan yang dibuat maka akan muncul perdebatan-perdebatan dalam pelaksanaannya. Dengan begitu harus memiliki arah dan kecenderungan terhadap ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang dibuat dari kebijakan tersebut.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi menjadi ala penting dalam penyampaian suatu pesan. Tujuan dari implementasi tersebut bisa tercapai apabila komunikasi antar pegawai atau organisasi dapat menyampaikan pesan sesuai dari kebijakan yang ditetapkan. Komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakna. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil.

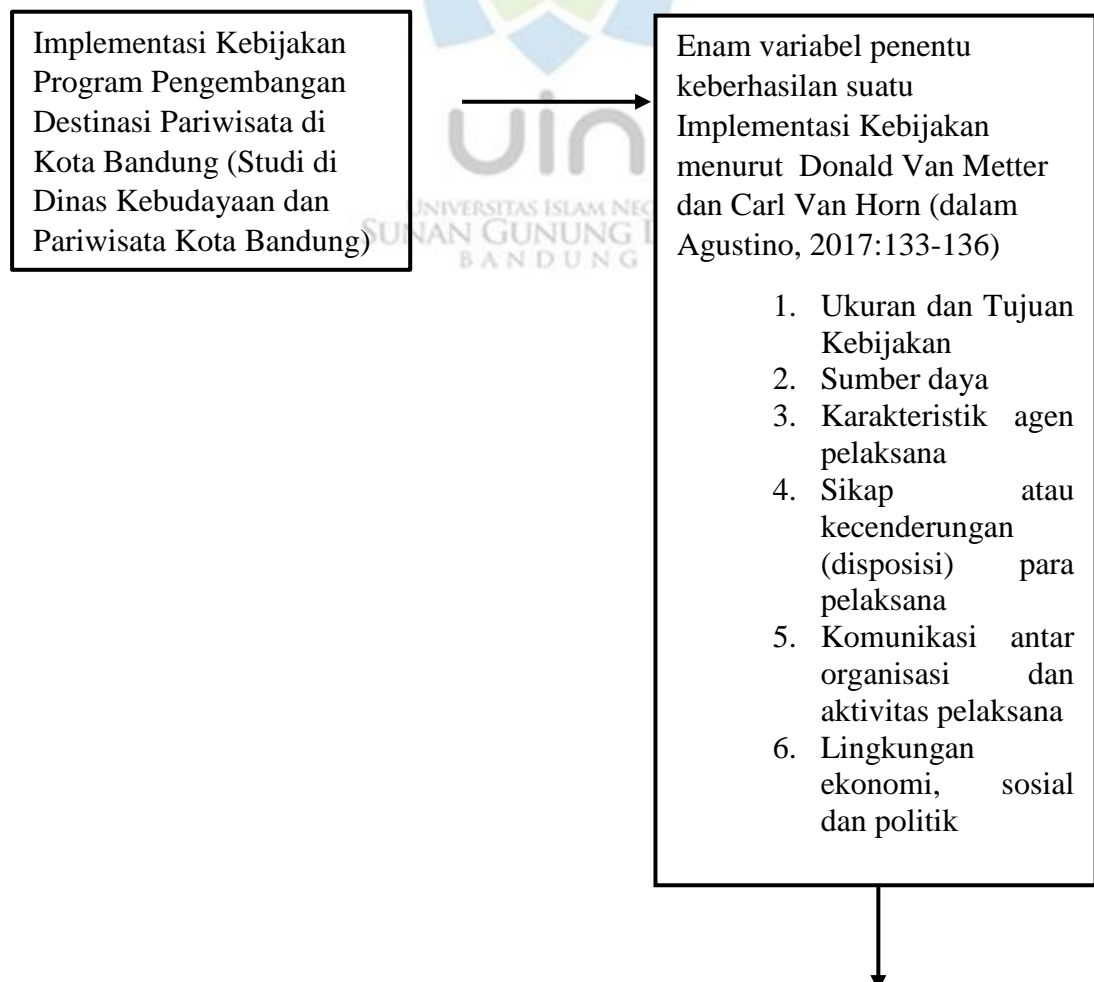
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi dalam pencapaian implementasi kebijakan harus dilihat dari berbagai aspek yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi akar masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk meng implementasikan kebijakan harus pula memeperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Penggunaan teori diatas sangat berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dimana keenam indikator diatas dapat menunjang peran Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai salah satu instansi pemerintah harus memaksimalkan setiap kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini ingin mengkaji implementasi kebijakan yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dari hasil analisis selanjutnya akan diperoleh kesimpulan dan menjadi bahan rekomendasi pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran di atas ditampilkan melalui skema berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia
3. Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan program

